



**PPN
12%**

Wacana Kenaikan PPN 12%

Ali Nur Alizen

Aldy Pahala Rizky

Ratu Dyah Ayu Gendiswardani

Raisudin

Salma Salima Hariza Nihru

7 Desember 2024

Rangkuman Utama

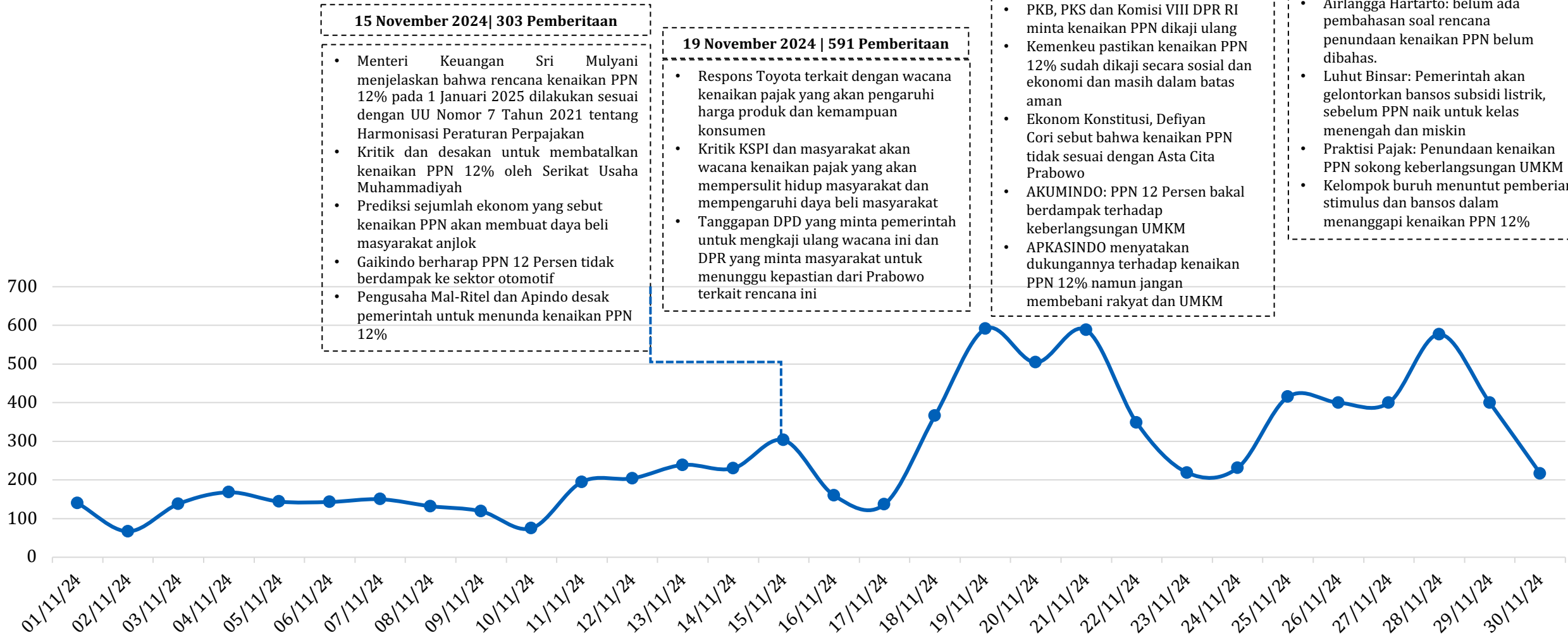
Pantauan media atas isu Wacana Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tanggal 1-30 November 2024 menghasilkan beberapa temuan menarik.

Di media daring, pemberitaan mulai naik pada tanggal 14 November 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa kenaikan PPN sebesar 12% akan dilakukan pada awal tahun 2025. Kenaikan ini juga sudah melewati tahapan uji sosial dan ekonomi serta sudah sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Hal ini kemudian mendapatkan respons penolakan dari berbagai kalangan seperti pengusaha Mal-Ritel, Apindo, Serikat Pengusaha Muhammadiyah, dan Gaikindo. Kenaikan ini dianggap akan mempengaruhi daya beli masyarakat yang diprediksi anjlok khususnya pada kelompok kelas menengah yang semakin terjepit. Pemberitaan kemudian kembali naik karena adanya aksi di media sosial yang kembali menaikkan lambang Garuda biru yang disertai dengan seruan penolakan kenaikan PPN 12%. Beberapa ekonom kemudian menyebutkan bahwa kenaikan pajak ini tidak sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo dan menyarankan alternatif lain untuk menambah pemasukan negara. Salah satunya adalah penerapan pajak harta dan pajak karbon. Selain itu, DPD meminta pemerintah untuk kembali mengkaji wacana ini dan meminta masyarakat menunggu keputusan Presiden Prabowo terkait dengan wacana ini. Terakhir, Luhut B. Pandjaitan memberikan sinyal bahwa rencana kenaikan PPN 12% akan ditunda, namun Airlangga Hartarto menyatakan belum ada pembahasan soal rencana penundaan kenaikan ini. Lima tokoh yang paling banyak diberitakan adalah **1) Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto; 2) Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono; 3) Menteri Sosial Saifullah Yusuf; 4) Presiden RI Prabowo Subianto; dan 5) Chief Economist Bank Permata Josua Pardede**

Media sosial didominasi oleh sentimen negatif terhadap pemerintah dan menyuarakan isu ini dengan besaran kluster negatif (93,75%). Dari berbagai macam platform, X menjadi tempat dengan eksposur tertinggi dalam membicarakan kasus ini. Warganet mempertanyakan kredibilitas para pejabat karena merasa bahwa pejabat sembarangan dalam mengambil kebijakan. Kenaikan ini juga dipermasalahkan karena dinilai tidak sebanding dengan kinerja pemerintah dalam menyejahterakan rakyat. Beberapa kata yang paling sering muncul dalam percakapan warganet adalah (1) **Kenaikan PPN**, 11.988 *post*, (2) **BPJS Kesehatan**, 4.196 *post* (3) **Asuransi Wajib Kendaraan**, 4.194 *post*, (4) **Third Party Liability**, 4.194 *post*, dan (5) **Tax Amnesty**, 4.007 *post*, dan [6] **Pengampunan Pajak**, 3.509 *post*.

Media Daring

Pergerakan Eksposur Pemberitaan



15 November 2024 | 303 Pemberitaan

- Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa rencana kenaikan PPN 12% pada 1 Januari 2025 dilakukan sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Kritik dan desakan untuk membatalkan kenaikan PPN 12% oleh Serikat Usaha Muhammadiyah
- Prediksi sejumlah ekonom yang sebut kenaikan PPN akan membuat daya beli masyarakat anjlok
- Gaikindo berharap PPN 12 Persen tidak berdampak ke sektor otomotif
- Pengusaha Mal-Ritel dan Apindo desak pemerintah untuk menunda kenaikan PPN 12%

19 November 2024 | 591 Pemberitaan

- Respons Toyota terkait dengan wacana kenaikan pajak yang akan pengaruhi harga produk dan kemampuan konsumen
- Kritik KSPI dan masyarakat akan wacana kenaikan pajak yang akan mempersulit hidup masyarakat dan mempengaruhi daya beli masyarakat
- Tanggapan DPD yang minta pemerintah untuk mengkaji ulang wacana ini dan DPR yang minta masyarakat untuk menunggu kepastian dari Prabowo terkait rencana ini

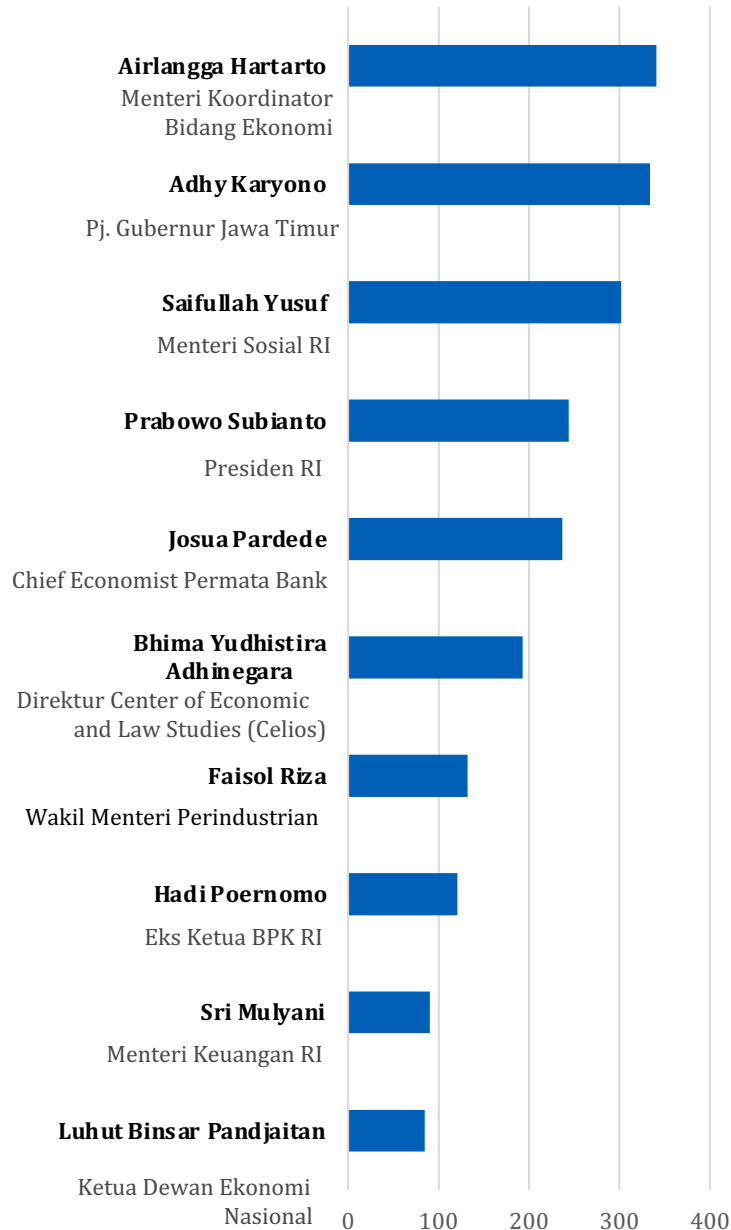
21 November 2024 | 588 Pemberitaan

- Warganet serukan tolak PPN 12% di media sosial disertai dengan garuda biru
- PKB, PKS dan Komisi VIII DPR RI minta kenaikan PPN dikaji ulang
- Kemenkeu pastikan kenaikan PPN 12% sudah dikaji secara sosial dan ekonomi dan masih dalam batas aman
- Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori sebut bahwa kenaikan PPN tidak sesuai dengan Asta Cita Prabowo
- AKUMINDO: PPN 12 Persen bakal berdampak terhadap keberlangsungan UMKM
- APKASINDO menyatakan dukungannya terhadap kenaikan PPN 12% namun jangan membebani rakyat dan UMKM

28 November 2024 | 577 Pemberitaan

- OECD kritik aturan bebas PPN bagi UMKM omzet di bawah Rp4,8 M
- Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES), Suroto: ketimbang naikkan PPN, penerapan pajak harta lebih efektif
- Airlangga Hartarto: belum ada pembahasan soal rencana penundaan kenaikan PPN belum dibahas.
- Luhut Binsar: Pemerintah akan gelontorkan bansos subsidi listrik, sebelum PPN naik untuk kelas menengah dan miskin
- Praktisi Pajak: Penundaan kenaikan PPN sokong keberlangsungan UMKM
- Kelompok buruh menuntut pemberian stimulus dan bansos dalam menanggapi kenaikan PPN 12%

Aktor Utama



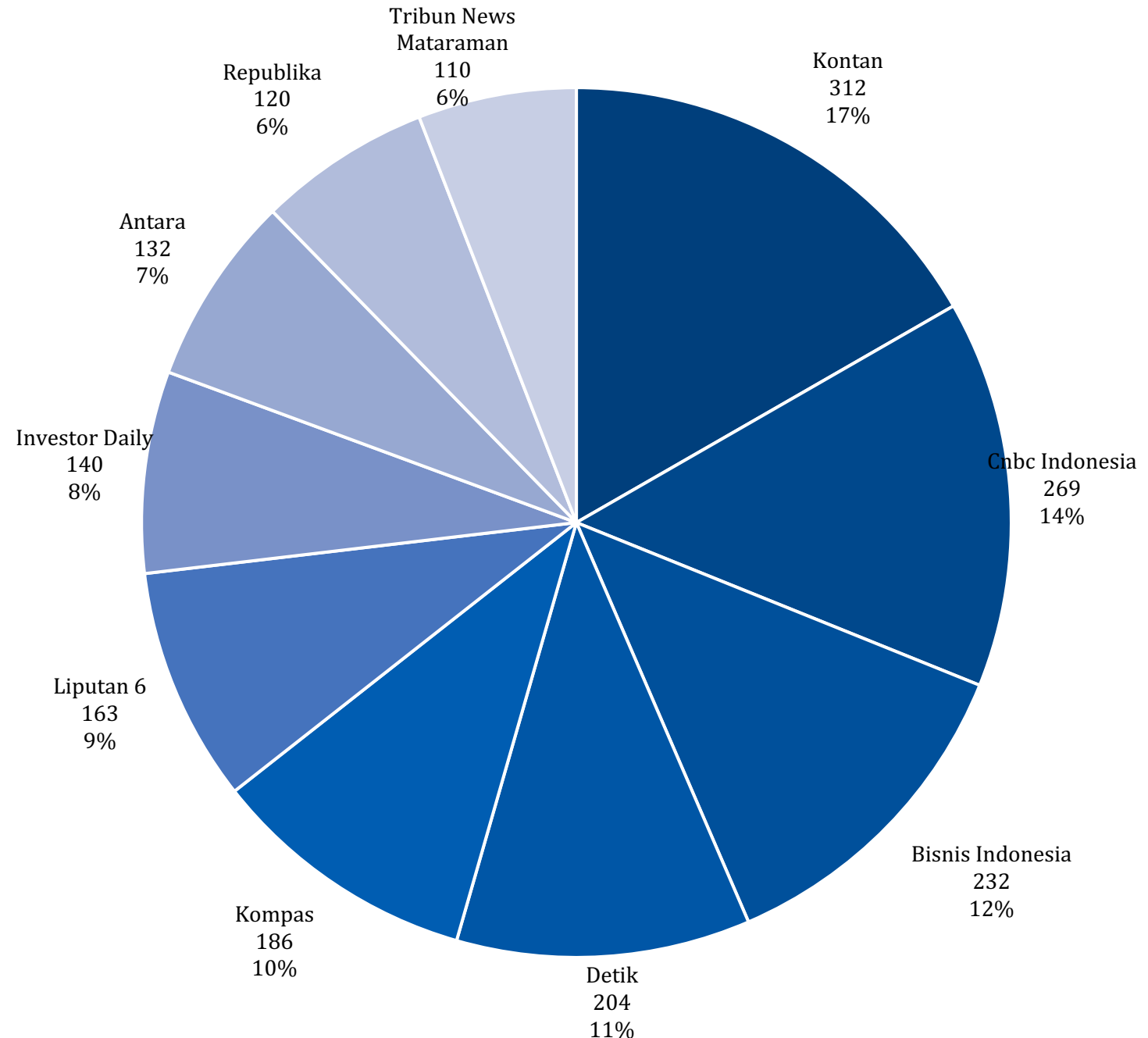
- **Airlangga Hartarto** menyebutkan, Pemerintah akan mengumumkan mengenai kebijakan fiskal, salah satunya kenaikan tarif PPN 12%, pada pekan kedua bulan Desember 2024 terkait Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk otomotif dan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).
- **Adhy Karyono** mengumumkan bahwa berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, mengatur pemberlakuan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB) yang akan dimulai pada tahun 2025 ke depan.
- **Saifullah Yusuf** mengungkapkan pemerintah sedang memetakan data untuk bansos akibat pertambahan PPN menjadi 12%, dan menegaskan jika pemerintah saat ini tengah menyiapkan data-data terkait siapa yang berhak untuk mendapatkan bansos.
- **Prabowo Subianto** mengumumkan kenaikan UMP nasional tahun 2025 sebesar 6,5% pada tanggal 29 November 2024.
- **Josua Pardede** Kenaikan tarif PPN menjadi 12% yang rencananya berlaku pada 1 Januari 2025 menuai beragam reaksi. Sebab, kenaikan ini diperkirakan memberikan beragam dampak negatif bagi ekonomi Indonesia, kenaikan PPN menjadi 12% dirasa belum perlu. Apalagi, saat ini jumlah masyarakat kelas menengah kian menyusut dalam lima tahun terakhir.
- **Bhima Yudhistira Adhinegara** mengatakan kenaikan tarif PPN 12% ini bila diakumulasi dalam 4 tahun terakhir atau 2022-2025 naik sebesar 20% dan akan memberikan efek langsung dalam menaikkan inflasi umum. Pasalnya berbagai barang nantinya akan lebih mahal harganya. Sehingga daya beli masyarakat menurun khususnya di kalangan kelas menengah dan akan mengancam pertumbuhan ekonomi yang dominan disumbang dari konsumsi rumah tangga.
- **Faisol Riza** mendukung target global *net zero emission* (NZE), Indonesia telah menyiapkan insentif menarik, seperti pembebasan PPnBM, bea masuk nol persen, dan PPN DTP untuk kendaraan listrik.
- **Hadi Poernomo** menyebutkan kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% pada 2022, dan rencana 12% pada 1 Januari 2025, diatur dalam UU HPP Pasal 7 ayat (1). Data Badan Pusat Statistik menyebut sebagian besar tenaga kerja Indonesia (lebih dari 50 juta orang) berpendidikan rendah, dengan daya beli terbatas. Oleh karena itu, kenaikan tarif PPN akan menambah beban mereka, mengurangi daya beli, dan memperparah ketimpangan sosial-ekonomi.
- **Sri Mulyani** menegaskan akan tetap menjalankan kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% pada 2025.
- **Luhut Binsar Pandjaitan** mengatakan bahwa kebijakan kenaikan PPN 12% masih banyak penolakan dari masyarakat meski ketentuan PPN 12% diatur dalam UU HPP tahun 2021. Luhut menduga kebijakan tersebut bakal diundur akibat penolakan yang masif di masyarakat.

Sebaran Media

Secara umum, pemberitaan di media daring terkait dengan wacana kenaikan tarif PPN sebesar 12% diangkat secara **netral cenderung negatif** oleh media. Namun demikian media seperti Antara, Republika, Investor Daily dan Liputan 6 memberitakan isu ini secara netral dengan kecenderungan positif.

Pemberitaan terkait isu ini cukup banyak diangkat oleh media yang berfokus pada sektor **ekonomi, bisnis, dan keuangan** seperti Kontan, Bisnis Indonesia dan Investor Daily. Beberapa isu yang naik di media ini adalah kritik dan desakan untuk tunda/batalkan wacana ini dari berbagai pihak seperti partai politik, DPR dan pengusaha, dampak pada perekonomian khususnya pada kelas menengah, UMKM dan pengusaha konstruksi serta otomotif.

Isu lainnya yang diangkat adalah terkait dengan wacana penundaan kenaikan PPN 12%, polemik pemberian bansos PPN 12% yang akan diberikan secara non tunai dan guyuran stimulus sebelum kenaikan pajak 12% dianggap tidak menyelesaikan masalah. Pernyataan pengamat ekonomi yang sebut PPN 12% dan *Tax Amnesty* jilid III akan merusak ekonomi Indonesia, desakan DPR dan pengusaha berbagai sektor dan APINDO meminta pemerintah membatalkan/menunda kenaikan pajak ini dan membuka keran penerimaan negara baru seperti menutup impor ilegal dan memberlakukan pajak karbon, prediksi PHK massal akibat kebijakan ini dan kenaikan gaji sebesar 6,5% oleh Prabowo.



Semesta Kata

pemerintah mempertimbangkan kondisi kesehatan
 tiket untuk penerbangan ppn 11 persen penurunan harga tiket pesawat selama masa nataru
 pajak pertambahan nilai kenaikan ppn menjadi 12 persen paket platinum 30 hari
 kenaikan ppn pertumbuhan ekonomi

daya beli masyarakat

pendapatan negara penerimaan negara
 tarif ppn ppn 12 persen daya beli sri mulyani
 rencana pemerintah
 menteri keuangan sri mulyani indrawati menyatakan rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai
 presiden prabowo mengadakan ratas pembelian paket diamond sudah termasuk akses nonton liga inggris

Beberapa kata yang paling sering muncul dalam pemberitaan adalah (1) **Daya Beli Masyarakat**, 551 *post*, (2) **Penerimaan Negara**, 218 *post* (3) **Kenaikan PPN**, 215 *post*, (4) **Pertumbuhan Ekonomi**, 191 *post*, dan (5) **Pendapatan Negara**, 182 *post*.

Wacana kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% menjadi polemik. Rencana ini telah tercantum dalam UU HPP yang menargetkan implementasi paling lambat Januari 2025. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan penerimaan negara untuk menopang pembangunan, namun menimbulkan kekhawatiran terhadap daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan PPN dinilai dapat memengaruhi daya beli masyarakat karena berpotensi menaikkan harga barang dan jasa. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga—yang menyumbang lebih dari 50% pada PDB nasional—dapat tertekan, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kenaikan PPN berisiko meningkatkan biaya dalam rantai pasok, mengurangi daya saing sektor industri, dan memicu inflasi. Di sisi lain, pemerintah mengharapkan tambahan penerimaan dari kenaikan ini dapat menutup defisit anggaran. Meski begitu, sejumlah pihak menyerukan kajian mendalam untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak justru memperburuk kondisi ekonomi rakyat dan sektor usaha, terutama mengingat dampaknya yang luas terhadap stabilitas ekonomi.

Media Sosial

Akun : 4.155
 Nodes : 4.205
 Edges : 11.100
 Posts : 217.387

Jagat Cuit

Wacana Kenaikan PPN 12%

Klaster Positif | 0,12%

- Narasi: PPN bukan akhir dari segalanya dan mau tidak mau sebaiknya kita membantu pemerintah
- Kenaikan PPN 12% adalah amanat UU HPP bukan karena Sri Mulyani. Hal ini juga disetujui oleh 8 fraksi partai di DPR
- Kenaikan PPN disebut sebagai bentuk partisipasi masyarakat untuk mendanai program Presiden Prabowo
- PPN 12% itu produk Undang-undang yang digarap oleh DPR di era Jokowi saat masih mesra bersama PDI Perjuangan
- PPN 12% akan mengoptimalkan penerimaan negara untuk pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi

Klaster Netral | 6,14%

- Pemerintah disebut bakal mengundur penerapan PPN 12% yang diungkap oleh Luhut Binsar Pandjaitan
- Persentase tarif PPN Indonesia tertinggi nomor dua di ASEAN setelah Filipina
- Sri Mulyani memastikan kenaikan PPN 12% akan dimulai awal Januari 2025
- Kenaikan tarif PPN menjadi salah satu isu yang paling penting dibahas selain isu LGBTQ
- Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk memasukkan RUU Pengampunan Pajak dalam Prolegnas Prioritas 2025, di tengah protes terkait kenaikan tarif PPN 12



Klaster Negatif | 93,75%

- Anas Urbaningrum meminta pemerintah untuk menunda PPN 12% karena keadaan ekonomi masyarakat belum siap
- Sindiran warganet yang berharap pendukung pemerintah/pendukung kenaikan pajak mendapat PPN 50%
- Warganet mengeluh terkait daya beli melemah, perlambatan ekonomi global dan kenaikan PPN 12%
- Komparasi harga buku di Indonesia yang kena pajak sedangkan di Malaysia tidak
- Omzet pedagang Tanah Abang turun 80% mulai terdampak akibat wacana PPN 12%
- Kritik warganet atas kekayaan Rp370 triliun Low Tuck Kwong pemilik tambang batu bara
- Kritik ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta yang ingin menetapkan kantin sekolah menghasilkan retribusi daerah
- Warga menyerukan berbelanja di toko kelontong dan pasar tradisional merespons kebijakan PPN 12% untuk memboikot pemerintah
- Kenaikan PPN 1% sama dengan biaya hidup yang naik menjadi 9%
- Kritik konglomerat diberi *tax amnesty* sementara warga miskin terjerat PPN 12%
- 10 tahun APBN dirusak oleh Mulyono dan pemerintah kini mesti menyesuaikan sehingga menaikkan PPN
- Pada 2025 warga mengeluhkan: *Coming soon* di 2025 PPN 12%, Tapera, Asuransi kendaraan bermotor.
- PPN 10% berlaku Tahun 1950; PPN 11% berlaku Mei 2022; PPN 12% berlaku Januari 2025
- Warga mengeluhkan PPN paling tinggi di Asia Tenggara namun masyarakatnya tidak sejahtera
- Warga tidak ikhlas uang pajaknya digunakan untuk menghidupi pejabat
- Protes warga atas PPN 12% dengan menaikkan garuda biru dan tagar #PajakMencekik serta tagar #TolakPPN12Persen
- Warganet mengkritik wacana penambahan tunjangan pensiun mantan presiden di tengah wacana kenaikan PPN
- Warganet mengingatkan untuk tidak teralihkan dengan isu konflik horizontal dan berita artis
- Komparasi Indo vs Singapura: PPN yang lebih tinggi namun UMR jauh lebih rendah
- Apresiasi pada Rieke Diah Pitaloka yang melakukan simulasi kenaikan PPN terhadap harga barang
- Situasi Indonesia terkini defisit anggaran semakin dalam, utang jatuh tempo menggunung, kenaikan pajak, korupsi merajalela dan oligarki serta politisi hanya mementingkan ambisi pribadi
- PPN 12% hanya untuk menggaji pembunuh berseragam
- FPKS meminta pemerintah meninjau ulang penerimaan negara bukan dengan jalan pintas menaikkan PPN

Positif
0,2%

Netral
6,14%

Negatif 93,75%

Lini Masa

20 November | 11.232 Percakapan

- Penghitungan kenaikan pajak 12% sama dengan kenaikan pengeluaran 9%.
- *Trending* tagar #TolakPPN12Persen.
- Kelas menengah ke bawah dicekik dengan kenaikan pajak, kelas atas justru mendapatkan pengampunan pajak; respons RUU Pengampunan Pajak masuk prolegnas.
- Pemerintah seharusnya menyita aset konglomerat yang menghindari pajak.
- Seruan aksi buruh menuntut kelayakan upah.

26 November | 5.478 Percakapan

- PPN naik ke 12%, digunakan untuk membayar gaji polisi yang menyerang sipil.
- Jarak kenaikan PPN ke 11 % 72 tahun, sedangkan jarak kenaikan ke 12% kurang dari 3 tahun.
- Apindo dan Gapensi menolak PPN.
- Dampak kenaikan PPN itu masif, dapat menurunkan daya beli masyarakat.



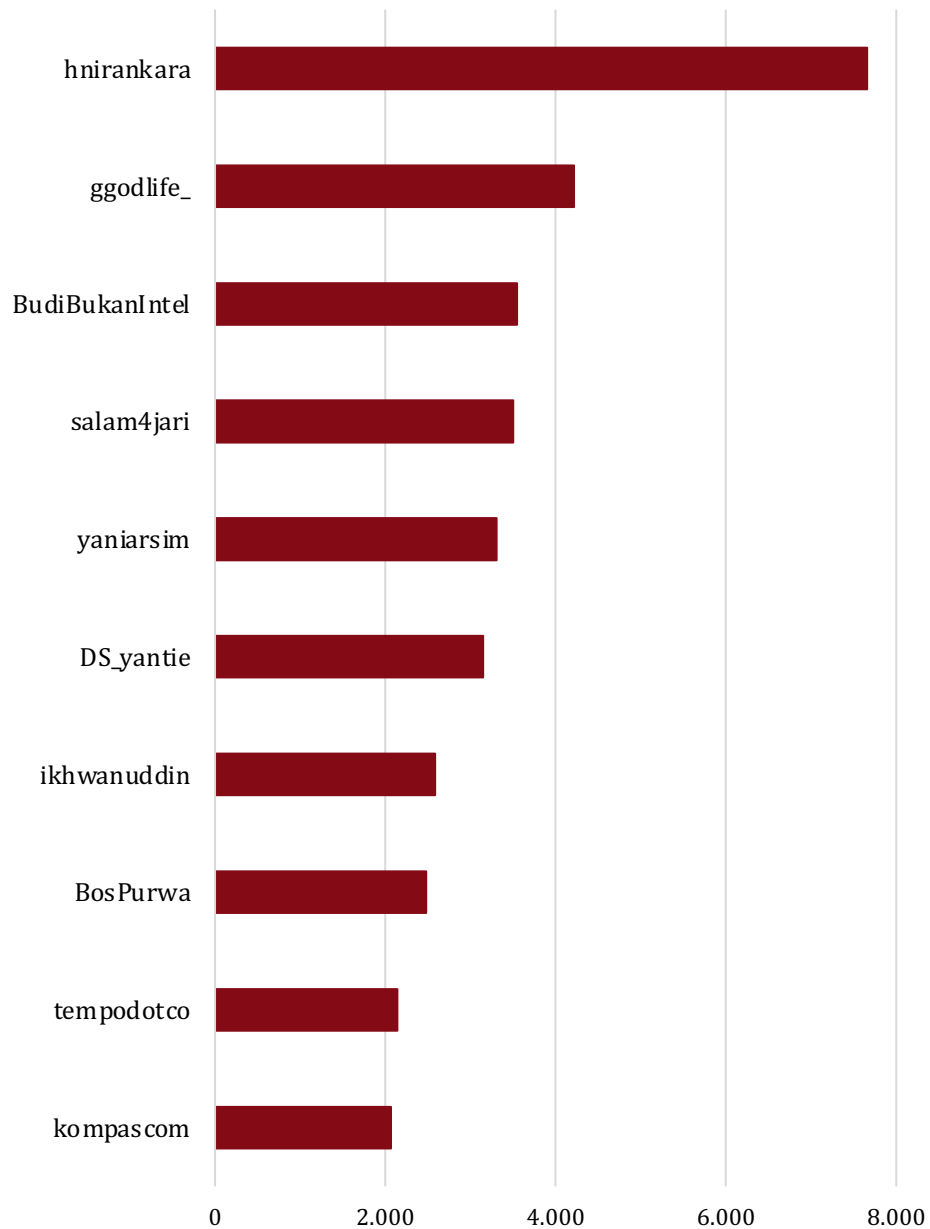
Total Unggahan

97.935

Total Pelibatan

1.535

Influencer



No.	Akun	Isu
1.	hnirankara	Kenaikan PPN 12% mengacu ke negara-negara Eropa. Indonesia seharusnya merujuk pada Malaysia atau Singapura yang menerapkan PPN di bawah 10%, tetapi pertumbuhan ekonomi jauh melampaui Indonesia; Ironi kelas menengah-bawah diinjak kenaikan pajak, kelas atas mendapatkan pengampunan; RUU HPP justru membebani rakyat kecil, pemerintah seharusnya mengejar PPh konglomerat dan pejabat.
2.	ggodlife_	Masyarakat wajar merasakan marah karena ada 10 pungutan yang berisiko naik di 2025 seperti PPN, Tapera, BPJS, UKT, cukai dan lain-lain.
3.	BudiBukanIntel	Seruan menaikkan tagar #TolakPPN12Persen; Isu perusahaan FMCG akan melakukan pemangkasan SDM efek kenaikan PPN; Tagar #PajakMencekik, #TolakPPN12Persen, dan #TolakKenaikanPPN; Rakyat bekerja untuk membayar pajak hingga kelelahan, tapi kinerja pemerintah jelek.
4.	salam4jari	Ajakan boikot bayar pajak jika pemerintah memaksakan kenaikan PPN menjadi 12%; Narasi menyalahkan pemerintah yang hanya bisa memalak rakyat.
5.	yaniarsim	Rakyat biasa harus terbebani dengan kenaikan pajak 12%, sedangkan pengusaha memperoleh pengampunan pajak; Penarikan pajak tanpa memberikan timbal balik untuk rakyat merupakan kejahatan.
6.	DS_yantie	PPN di negara maju di bawah 10% dengan UMR 20-30 kali lipat Indonesia, sedangkan Indonesia negara berkembang dengan PPN 12%.
7.	ikhwanuddin	Simulasi penghitungan kenaikan PPN 11% ke 12% dengan kondisi gaji yang tidak naik, dampaknya akan terasa ke 'perut'.
8.	BosPurwa	Seruan menaikkan tagar #TolakPPN12Persen; Buruh menolak kenaikan PPN; PPN justru menyebabkan penderitaan mendalam bagi rakyat.
9.	tempodotco	Rakyat kecil tercekik PPN 12% sedangkan orang kaya memperoleh <i>tax amnesty</i> ; Utas dampak kenaikan PPN 12%, bisa memicu penurunan daya beli; Luhut menyebut kenaikan PPN 12% akan diundur; Sri Mulyani menyatakan kebijakan ini sudah mempertimbangkan banyak hal, tidak datang begitu saja.
10.	kompas.com	Tren pesan berlatar biru bertuliskan " <i>Taxation without representation is a crime</i> " untuk memprotes kenaikan PPN menjadi 12%; Ajakan <i>frugal living</i> menggema di X karena kenaikan PPN.

Jagat Tagar

tolakppn12persen FufufafaBocilIdiot bisnis
 JokowiGibranPerusakNKRI research tempodotco
 TolakKenaikanPPN PPN12
TolakPPN12Persen
 TempoThread PajakMencekik PPN
 TimnasDay LembagaPenyelidikanEkonomiMasyarakat
 JumatBerkah

Narasi penolakan terhadap kenaikan PPN ke 12% mendominasi jagat tagar. Warganet menggaungkan penolakan melalui tagar #TolakPPN12Persen, #PajakMencekik, #TolakKenaikanPPN, dan #JokowiGibranPerusakNKRI.

Selain itu, @LPEMFEBUI menggunakan tagar #PPN12%, #LembagaPenyelidikanEkonomiMasyarakat, #research untuk merilis *Indonesia Economic Outlook 2025*. Dalam rilis ini, kenaikan PPN disebut dapat membebani Rumah Tangga dengan penghasilan rendah 'secara tidak proporsional'.

Di sisi lain, muncul *buzzer* yang melakukan operasi tagar #PPN12 untuk melakukan kontra narasi, mendukung kenaikan PPN menjadi 12% dengan alasan mendorong pembangunan ekonomi. PPN juga nantinya akan kembali kepada rakyat.

Tempo juga mengulas kenaikan PPN menjadi 12% terutama perihal pengaruh dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, melalui akun resmi media sosial X @tempodotco. Tagar yang dinaikkan yaitu #TempoThread dan #tempodotco. Sementara Kumparan menggunakan tagar #bisnis.

Jagat Kata

pendidikan gratis naikkan kualitas hidup subsidi lahiran
 ekonomi rakyat anggota dpr mantan menteri
 jepang hari umr nya Orb perbulan too kelanjutan
 pengampunan pajak aksi kamisan hari
 asuransi wajib kendaraan media sosial

kenaikan ppn

bpjs kesehatan iuran bpjs
 3kg beras tax amnesty third party liability
 ekonomi ilegal 0x lipat tax ratio kenaikan pajak
 uang pensiunalokasi pengeluaran ongkos transport
 govt korup artinya jumlah beras simply penerimaan pajak

Wacana penerapan PPN 12% mendapat respons negatif yang dominan dari masyarakat. Banyak pihak melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan ini, dengan alasan daya beli masyarakat yang melemah, situasi ekonomi global yang belum stabil, dan dampaknya terhadap usaha kecil. Kritik juga diarahkan pada kesenjangan sosial, seperti pengampunan pajak untuk konglomerat sementara masyarakat umum menghadapi beban pajak lebih tinggi.

Warganet memprotes kebijakan ini dengan berbagai cara, termasuk seruan boikot dan tagar protes, karena dianggap tidak sejalan dengan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, warga melakukan komparasi dengan negara lain di Asia Tenggara. Indonesia saat ini menempati urutan kedua setelah Filipina dengan PPN tertinggi di kawasan. Kontras dengan Singapura yang memiliki PPN 8%, namun diikuti dengan UMR yang jauh lebih besar dibandingkan di Indonesia. Warga juga mengeluhkan masa pemberlakuan PPN 11% yang relatif singkat dari 2022 hingga 2024, sedangkan PPN 10% berlaku sejak 1950 hingga 2022.

Dari sisi partai, Fraksi PKS mengajukan peninjauan ulang pada pemerintah untuk menunda pemberlakuan PPN 12%. Rieke Diah Pitaloka dari PDI Perjuangan juga membuat simulasi kenaikan pajak sama dengan kenaikan harga barang sekitar 9%. Anas Urbaningrum juga menyampaikan lewat unggahannya agar pemerintah dapat menunda wacana ini di tengah situasi ekonomi masyarakat yang tidak stabil.

Di sisi positif, kebijakan ini dianggap sebagai langkah partisipasi masyarakat dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan program pemerintah, wacana ini juga dibela sebagai amanat UU Nomor 7 Tahun 2021 yang diresmikan oleh 8 fraksi partai DPR termasuk PDI Perjuangan ketika masih mesra dengan presiden Jokowi. Kebijakan ini juga diakui sebagai bentuk dukungan publik untuk program Presiden Prabowo di masa mendatang dengan tujuan mengoptimalkan penerimaan negara demi pertumbuhan ekonomi.

Lampiran

Cuplikan Pemberitaan Media Daring



KSPI: Kenaikan PPN 12% Bikin Hidup Buruh Makin Sulit

Paradigma Bangsa

🕒 2024-11-19 23:34:18

Jakarta - Rencana pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025 di tengah upah



Muncul Petisi Batalkan Kenaikan PPN 12 Persen, Warganet Serukan Penolakan

Idn Times

🕒 2024-11-19 23:31:50

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen pada tahun 2025 menuai gelombang penolakan dari



PPN Bakal Naik Jadi 12 Persen, Pengamat Prediksi Bisa Tekan Daya Beli

Republika

🕒 2024-11-19 23:42:11

Pengamat ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai, kenaikan PPN menjadi 12



Bulan Januari PPN Naik Jadi 12 Persen, DPR Yakin Presiden Tidak Akan Menyusahkan Rakyat

Oposisi Cerdas

🕒 2024-11-19 23:46:03

Rencana pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) di bulan Januari 2025 dari yang sebelumnya 11 persen menjadi 12



Soal Tarif PPN Jadi 12 Persen, Ini Respons Toyota

Republika

🕒 2024-11-19 23:59:00

Wakil Presiden Direktur PT Toyota-Astra Motor (TAM) Henry Tanoto mengatakan perusahaan akan tetap menghormati keputusan



Kenaikan Tarif PPN Jadi 12 Persen Dikritik UMKM, SUMU Minta Pemerintah Batalkan

Wartamu.id

🕒 2024-11-15 22:19:52

Rencana pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025 mendapat sorotan tajam



Penjelasan menkeu Sri Mulyani soal tarif PPN naik 12 Persen

Kompas Tv

🕒 2024-11-15 23:46:47

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik dari sebelumnya 11 persen, menjadi

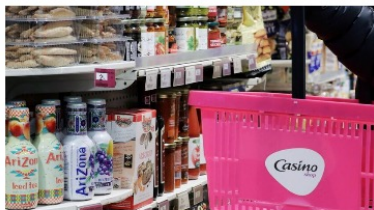


OECD Kritik Aturan Bebas PPN Bagi UMKM Omzet di Bawah Rp4,8 M

Indonesiamenyapa.com

🕒 2024-11-28 23:58:29

Indonesia Menyapa, Jakarta - Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD mengemukakan, batasan omzet



Ada Sejumlah Alasan Indonesia Menaikkan PPN, tetapi Apakah Sudah Tepat? | Page 6

Jpnn.com

🕒 2024-11-28 23:43:00

Ada Sejumlah Alasan Indonesia Menaikkan PPN, tetapi Apakah Sudah Tepat?








Ketimbang Naikkan PPN, Penerapan Pajak Harta Lebih Efektif

Rmol Sumut

🕒 2024-11-28 23:48:37

Salah satu tujuan utama diterapkan pajak oleh negara adalah untuk keadilan. Hal tersebut selain harus tercermin dalam alokasi

Akun dengan Jumlah Pelibatan Terbanyak di Media Sosial

DATE	ENGAGEMENTS	PLATFORM	POST TEXT	USER IMAGE	USER NAME
11/23/2024, 7:00:00 PM	32.386,20	tiktok	Rencana kenaikan PPN 12% per 1 Januari 2025 sudah disahkan lewat UU Nomor 7 Tahun 2021. Lantas, kenapa PPN harus naik menjadi 12%? #ohgitutempo #ppn #ppnnaik #ppn12persen #srimulyani #pajak #pajakindo...		tempo.co
11/24/2024, 7:28:11 AM	22.159,20	instagram	PPN MAU JADI YANG TERTINGGI DI ASEAN + PENGUSAHA BESAR MAU DIBERIKAN PENGAMPUNAN PAJAK NAMUN DI SISI LAIN UPAH RAKYAT MENJADI SALAH SATU YANG TERENDAH DI DUNIA. SEMOGA SAJA KEBIJAKAN INI DITINJAU ULAN...		sherlyannavita
11/1/2024, 10:03:17 PM	20.854,60	tiktok	Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memastikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan pembangunan IKN. Hal tersebut d...		polindo.id
11/19/2024, 7:04:09 PM	17.879,75	twitter	Berani naikin tagar ini #TolakPPN12Persen. Kelen keren! https://t.co/bZRu7Jxgra		BosPurwa
11/27/2024, 5:58:02 PM	16.389,20	tiktok	Ayo jangan lupa bayar pajak (12%) 🤔 #meme #stevansyoung #satire #comedy		stvansyoung

*Jumlah **engagements** dihitung berdasarkan seluruh interaksi yang dilakukan dalam satu *tweet* (**reply, likes, retweet, quote retweet**)



TERIMA KASIH